

**PEMBERITAAN SKH REPUBLIKA TENTANG KONFLIK PPP PASCA  
PEMILU LEGISLATIF EDISI APRIL-MEI 2014**



Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)

Disusun Oleh:

**Mochammad Zulfikri**

NIM 11210075

Dosen Pembimbing:

**Dr. Hamdan Daulay M.Si., M.A.**

NIP 19661209 199403 1 004

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2015**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 1385 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

PEMBERITAAN SKH REPUBLIKA TENTANG KONFLIK PPP PASCA PEMILU  
LEGISLATIF EDISI APRIL-MEI 2014

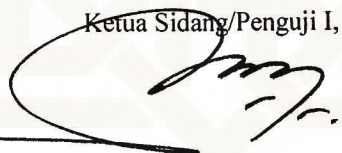
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOCHAMMAD ZULFIKRI  
NIM/Jurusan : 11210075/KPI  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 10 Agustus 2015  
Nilai Munaqasyah : 92,3 (A -)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

  
Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si.  
NIP 19661209 199403 1 004

Penguji II,

  
Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A.  
NIP 19470515 197010 1 001

Penguji III,

  
Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.  
NIP 19710328 199703 2 001

Yogyakarta, 13 Agustus 2015

Dekan,



Dr. Nurjannah, M.Si

NIP 19660310 198703 2 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Mochammad Zulfikri

NIM : 11210075

Judul Skripsi : **Konflik PPP Pasca Pemilu Legislatif dalam SKH Republik Edisi April-Mei 2014**

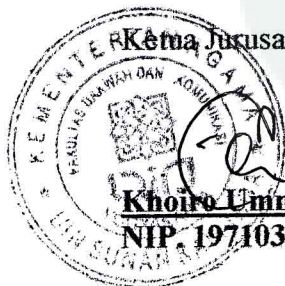
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/ Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Mei 2015

Pembimbing

**Dr. Hamdan Daulay M.Si., M.A.**  
NIP. 19661209 199403 1004



**Khoirul Ummatin, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19710328 199703 2 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochammad Zulfikri  
NIM : 11210075  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Pemberitaan SKH Republika Tentang Konflik PPP Pasca Pemilu Legislatif Edisi April-Mei 2014” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian – bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti ternyata ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 10 Agustus 2015

Yang menyatakan,



  
Mochammad Zulfikri  
NIM 11210075

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochammad Zulfikri  
NIM : 11210075  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Pemberitaan SKH Republika Tentang Konflik PPP Pasca Pemilu Legislatif Edisi April-Mei 2014” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian – bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti ternyata ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 10 Agustus 2015

Yang menyatakan,

Mochammad Zulfikri  
NIM 11210075

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini spesial penulis persembahkan untuk :

- Allah SWT atas segala karunia, kasih sayang, serta seluruh kenikmatan yang telah diberikan.
- Kedua Orang Tua Penulis, Ibu Hj. Dewi Khodijah M.Pd.I. dan Bapak Ir. H. Asy'ari Shodiq M.Ud yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya dan tak pernah berhenti dalam mendidik, mengajari penulis agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, nusa dan bangsa, serta doanya dalam menyertai langkah kehidupan penulis hingga saat ini.
- Kedua saudara kandung penulis, Ulissyifa dan Dea Filzah Fahrana serta keluarga besar penulis Mas Cumba, Noura Aleena, Fauzia terimakasih atas supportnya selalu
- Teman-teman Ponpes Aji Mahasiswa Al-Muhsin Krapyak dan Kosma 2011-2014
- Almamater Komunikasi dan Penyiaran Islam 2011 dan Crew Suka TV
- Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **MOTTO**

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling  
bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang terang. Dan atas ridho-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemberitaan SKH Republika Tentang Konflik PPP Pasca Pemilu Legislatif Edisi April-Mei 2014”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material. Untuk itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji M.A., PhD. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjanah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



4. Dr. Hamdan Daulay M.Si., M.A. selaku pembimbing skripsi dan penasehat akademik yang dengan sabar membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan karya ini.
5. Seluruh dosen Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah dengan tulus dan ikhlas mengajarkan seluruh ilmunya.
6. Fauzia, Akbar, Aziz, Riza, Bagus, Zamhari, Aris, dan Anik yang bersedia meluangkan waktunya untuk selalu mengoreksi, diskusi, menemani dan memberikan masukan
7. Teman-teman kosma timoho
8. Teman-teman santri Krapyak PP Aji Mahasiswa Al-Muhsin
9. Terakhir terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis satu persatu, tanpa kalian semua penulis tidak mungkin sampai disini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapakan kritik dan sarannya yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Yogyakarta, 29 Mei 2015

Penyusun,

**Mochammad Zulfikri**

## ABSTRAK

Mochammad Zulfikri 11210075. *Pemberitaan SKH Republika Tentang Konflik PPP Pasca Pemilu Legislatif edisi April-Mei 2014*. Skripsi Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Konflik PPP pasca pemilu legislatif 2014 memberikan keprihatinan terhadap umat muslim, konflik yang bermula dari kedatangan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali pada kampanye terbuka Partai Gerindra, menuai reaksi dari internal partai, sehingga muncul dua kubu dalam internal PPP. Yakni kubu yang mendukung Suryadharma Ali dan kubu yang tidak setuju dengan sikap Suryadharma Ali. SKH Republika sebagai surat kabar harian yang berskala nasional, memiliki kebijakan tersendiri dalam melakukan pemberitaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui *frame SKH Republika* dalam memberitakan konflik PPP pasca pemilu legislatif edisi April dan Mei 2014. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis isi kritis dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Pada penelitian ini terdapat sepuluh berita yang dianalisis. Setelah dilakukan analisis dengan framing model Robert N. Entman penelitian ini menunjukkan bahwa framing yang dimunculkan *SKH Republika* cenderung menengahi konflik yang sedang dialami PPP. Hal ini terlihat dari penyelesaian masalah yang diambil SKH Republika dalam pemberitaannya. SKH Republika selalu membawa permasalahan ini untuk segera islah.

Kata Kunci : *Bingkai SKH Republika dan Konflik PPP Pasca Pemilu Legislatif*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Kerangka Teori.....	10
1. Konstruksi Realitas Media Massa .....	10
2. Framing Sebagai Konsep .....	11
3. Teori Konflik.....	13

H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM SKH REPUBLIKA DAN KONFLIK PPP</b>	
<b>PASCA PEMILU LEGISLATIF .....</b>	<b>20</b>
A. Sekilas Profil SKH Republika.....	20
1. Sejarah Berdirinya <i>SKH Republika</i> . .....	20
2. Visi dan Misi <i>SKH Republika</i> .....	22
3. Rubrik-rubrik dalam <i>SKH Republika</i> .....	22
4. Struktur Redaksi .....	23
B. Gambaran Umum Partai Persatuan Pembangunan .....	25
C. Kronologis Berita Konflik PPP Pasca Pemilu Legislatif 2014	27
<b>BAB III KONFLIK PPP PASCA PEMILU LEGISLATIF 2014 DALAM</b>	
<b>PEMBERITAAN SKH REPUBLIKA .....</b>	<b>30</b>
A. Deskripsi Singkat .....	30
B. Islah.....	35
C. Analisis Data Berita Konflik PPP Pasca Pemilu Legislatif	
2014.....	36
1. Berita Edisi 11 April 2014 <i>Nasib SDA Ditentukan di</i>	
<i>Mukernas III PPP</i> .....	36
2. Berita Edisi 15 April 2014 <i>Internal PPP Diserukan Islah...</i>	41
3. Berita Edisi 16 April 2014 <i>PPP Fokus Garap Koalisi</i> .....	47
4. Berita Edisi 17 April 2014 <i>Beredar SK Pemecatan</i> .....	52

5. Berita Edisi 20 April 2014 <i>SDA Diperingatkan, Dukungan ke Prabowo Dianggap Ilegal</i> .....	56
6. Berita Edisi 21 April 2014 <i>Jangan Tutup Islah</i> .....	61
7. Berita Edisi 22 April 2014 <i>SDA Buka Pintu Islah, Romi Gelar Mukernas</i> .....	66
8. Berita Edisi 23 April 2014 <i>Islah PPP Kaburkan Koalisi Dengan Gerindra</i> .....	70
9. Berita Edisi 9 Mei 2014 <i>Kemana Partai Ka'bah Berlindung</i>	75
10. Berita Edisi 16 Mei 2014 <i>Koalisi PPP Tanpa Syarat</i> .....	79
D. Hasil Pemaparan.....	84
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
C. Penutup .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Elemen-elemen Analisis Framing Robert N. Entman.....	16
Tabel 2. Daftar Berita Konflik PPP Pasca Pemilu Legislatif 2014.....	30
Tabel 3. <i>Frame</i> Berita <i>Nasib SDA Ditentukan di Mukernas III PPP</i> .....	40
Tabel 4. <i>Frame</i> Berita <i>Internal PPP Diserukan Islah</i> .....	45
Tabel 5. <i>Frame</i> Berita <i>PPP Fokus Garap Koalisi</i> .....	51
Tabel 6. <i>Frame</i> Berita <i>Beredar SK Pemecatan</i> .....	55
Tabel 7. <i>Frame</i> Berita <i>SDA Diperingatkan, Dukungan ke Prabowo Dianggap Illegal</i> .....	60
Tabel 8. <i>Frame</i> Berita <i>Jangan Tutup Islah</i> .....	65
Tabel 9. <i>Frame</i> Berita <i>SDA Buka Pintu Islah, Romi Gelar Mukernas</i> .....	69
Tabel 10. <i>Frame</i> Berita <i>Islah PPP Kaburkan Koalisi Dengan Gerindra</i> .....	74
Tabel 11. <i>Frame</i> Berita <i>Kemana Partai Ka'bah Berlindung</i> .....	78
Tabel 12. <i>Frame</i> Berita <i>Koalisi PPP Tanpa Syarat</i> .....	83

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “**Pemberitaan SKH Republika Tentang Konflik PPP Pasca Pemilu Legislatif Edisi April-Mei 2014**”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul tersebut, maka penulis perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Adapaun istilah-istilah yang perlu ditegaskan sebagai berikut.

#### 1. Berita

Berita merupakan sebuah informasi yang penting dan menarik<sup>1</sup>. Dengan kata lain berita adalah laporan mengenai fakta atau ide yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini merupakan berita seputar konflik PPP pasca pemilu legislatif.

#### 2. SKH Republika

*SKH Republika* merupakan surat kabar nasional yang dilahirkan dari kalangan komunitas muslim di Indonesia. Penerbitan koran ini diprakarsai dengan kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) saat itu diketuai oleh BJ Habibie. Penerbitan tersebut merupakan

---

<sup>1</sup> Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008). Hlm. 64

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 65



puncak dari upaya panjang kalangan umat muslim, khususnya para wartawan profesional muda yang dipimpin Zaim Uchrowi mantan wartawan *Tempo*. *SKH Republika* terbit perdana pada tanggal 4 Januari 1993.<sup>3</sup>

### 3. Konflik

Konflik merupakan persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain.<sup>4</sup> Dengan kata lain konflik ini merupakan perselisihan akibat kepentingan, dan tuntutan yang bertentangan. Konflik itu terjadi apabila terdapat sikap saling mempertahankan diri diantara dua kelompok yang memiliki tujuan dan pandangan yang berbeda dalam mencapai suatu tujuan.<sup>5</sup>

### 4. PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan sebuah partai politik di Indonesia yang berasal dari gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nadlatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, Perti dan Permusi yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973. Penggabungan beberapa partai tersebut guna menyerderhanakan kepartaian di Indonesia menjelang pemilihan umum pertama pada masa orde baru tahun 1973.

---

<sup>3</sup> Wikipedia, "Sejarah Republika", [http://id.wikipedia.org/wiki/Republika\\_%28surat\\_kabar%29](http://id.wikipedia.org/wiki/Republika_%28surat_kabar%29), diakses pada Kamis, 30 Oktober 2014.

<sup>4</sup> Peg Pickering, *How to Manage Confilct Kiat Mengani Konflik*, terj. Masri Maris (Jakarta: Esensi, 2006), hlm. 1.

<sup>5</sup> Hafiz Apriadi, "Pengertian Konflik dan Definisinya", <http://www.slideshare.net/HafisAkbar/pengertian-konflik-dan-definisinya-serta-faktor-penyebabnya>. diakses pada Senin 20 Oktober 2014.

Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai yang berasaskan Islam dan berlambang Ka'bah, berdasarkan keputusan Muktamar IV tahun 1998. Saat ini Partai Persatuan Pembangunan diketuai oleh Suryadharma Ali<sup>6</sup>.

## 5. Pemilu Legislatif

Pemilihan dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan proses, cara perbuatan memilih. Sedangkan pemilu itu sendiri adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh segenap rakyat suatu negara untuk memilih rakyat<sup>7</sup>. Pemilihan umum juga sebagai sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di Lembaga Legislatif.

Legislatif dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan badan atau dewan yang berwenang membuat undang-undang.<sup>8</sup> Pemilu legislatif disini merupakan pemilihan yang dilakukan serentak oleh segenap rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Dalam penelitian ini pemilu legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014.

---

<sup>6</sup>Nasukha, "Sejarah Partai Persatuan Pembangunan", <http://PPPmadiun.com/2010/12/sejarah-partai-persatuan-pembangunan.html>. diakses pada Sabtu, 25 oktober 2014.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Bersama, 1991), hlm. 683.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 508.

Adapun makna pasca pemilu legislatif dalam penelitian ini, pemberitaan yang diambil pada edisi April dan Mei 2014.

Dari beberapa istilah di atas, maksud penelitian dari judul skripsi “Pemberitaan *SKH Republika* Tentang Konflik PPP Pasca Pemilu Legislatif Edisi April-Mei 2014” adalah melihat bagaimana *SKH Republika* dalam membingkai pemberitaan konflik PPP pasca pemilu legislatif 2014.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Tahun 2014 ini merupakan tahun istimewa bagi masyarakat Indonesia, karena pada tahun ini masyarakat Indonesia kembali melaksanakan momen politik berupa pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan bentuk perwujudan pesta demokrasi. Ditahun ini pula merupakan tahun penentuan siapakah yang akan menggantikan estafet kepemimpinan presiden di Indonesia. Berbagai partai disibukan untuk mengusung siapa kandidat calon yang ajukan. Kampanye pun dilaksanakan dari daerah-daerah hingga ibukota demi mendulang suara-suara untuk partainya. Pesta demokrasi tahun ini diikuti oleh beberapa partai diantaranya Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura.<sup>9</sup>

PPP salah satu partai berideologi Islam yang turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Disaat partai lain sedang sibuk mendulang suara untuk partainya, ketua umum PPP justru hadir dalam kampanye Partai

---

<sup>9</sup> <http://www.pemilu.com/hasil-pemilu-2014/> diakses pada Senin, 3 November 2014.

Gerindra pada tanggal 23 maret 2014 di GBK. Hal ini lah yang menjadi awal dari konflik yang terjadi dalam tubuh PPP.

Dalam era demokrasi ini, media massa sangatlah berkaitan dengan partai politik. Media massa turut aktif dalam memberikan informasi-informasi atau pemberitaan, pemberian makna terhadap suatu peristiwa, serta mempengaruhi khalayak dalam mendefinisikan persoalan-persoalan.<sup>10</sup> Media massa juga menjadi alat kampanye bagi partai politik. Pemilihan media massa sebagai alat kampanye partai politik dikarenakan media dianggap sebagai sarana yang efektif dalam memperkenalkan suatu partai dengan program-programnya.<sup>11</sup>

Dalam hal ini media massa khususnya koran, sangat berkaitan dalam menampilkan pemberitaan seputar konflik tersebut. Media massa merupakan sarana untuk menjual atau menyampaikan informasi, berita kepada para konsumen yang dapat sebagai pembaca, pendengar, maupun pemirsa.

Persoalan mengenai konflik dalam tubuh PPP ini menarik untuk dikaji lebih lanjut terutama untuk mengetahui peran media dalam pemberitaan terkait. Media massa khususnya surat kabar harian, sangat berperan penting dalam membangun sebuah wacana serta menjadikannya sebuah isu sebagai

---

<sup>10</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta:LKIS,2008), hlm. 259.

<sup>11</sup> Ali Mustofa, *Peran Media Massa sebagai Sarana Iklan Parpol*, jurnal tidak diterbitkan, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 4.

opini publik. Upaya penyelesaian konflik yang terdapat dalam tubuh PPP ini akan bergantung bagaimana surat kabar harian dalam memberitakannya.

Disaat konflik dalam tubuh PPP ini tak kunjung usai, Ketua Dewan Pembina PPP KH. Maimun Zubair menyeru untuk islah. Islah dalam bahasa arab artinya memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau permusuhan. Islah juga dapat diartikan berusaha menciptakan kedamaian, membawa keharmonisan, dan menganjurkan orang lain untuk berdamai antara satu dengan lainnya.<sup>12</sup> Kaitan komunikasi islam dalam penelitian ini, bagaimana pesan dakwah yang ditonjolkan oleh media terhadap sebuah partai politik yang sedang berseteru.

Penggunaan *SKH Republika* sebagai subjek penelitian dikarenakan media ini berideologi Islam, sehingga isu-isu yang diangkatpun cenderung berkaitan dengan dunia Islam. Poin inti dalam penelitian ini bagaimana *SKH Republika* yang berideologi Islam dalam membingkai pemberitaan konflik internal Partai Persatuan Pembangunan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana Surat Kabar Harian *Republika* membingkai pemberitaan konflik PPP pasca Pemilu Legislatif 2014?

---

<sup>12</sup> <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/23/mdxhpd-ensiklopedi-hukum-islam-islah-1> diakses pada Senin, 15 Februari 2015.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *SKH Republika* membingkai pemberitaan seputar konflik PPP pasca pemilu legislatif 2014.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan tentang jurnalistik pada *SKH Republika* dalam membingkai dan mengemas pemberitaan seputar konflik PPP pasca pemilu legislatif 2014.

##### 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan khususnya pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai analisis teks media menggunakan analisis *framing*.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk mendukung penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa karya penelitian terdahulu sebagai bahan acuan diantaranya:

*Pertama*, penelitian berjudul Konstruksi Berita Konflik Pasca Bencana Alam Pada harian *Kompas* yang disusun oleh Dian Muslimah Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta tahun 2013. Tujuan dari penelitian Dian adalah untuk mengetahui fokus pemberitaan koran Kompas terhadap situasi pasca bencana alam. Objek kajian pada penelitian ini adalah teks pemberitaan

konflik pasca bencana alam gempa bumi dalam koran *Kompas* edisi Oktober 2009. Hasil dari analisis penelitian ini adalah konflik masyarakat pasca bencana alam terdapat perbedaan aspirasi dalam masyarakat yang kemudian menimbulkan sikap dan persepsi negatif terhadap pihak lain. Sementara dalam analisis pada koran *Kompas* ditemukan gaya jurnalisme yang berhati-hati dalam mengulas konflik. Serta keberadaan tim redaksi yang melakukan penyeragaman bahasa menjadi gaya bahasa yang digunakan *Kompas* menjadi halus dan santun.<sup>13</sup>

*Kedua*, penelitian berjudul Fungsi Kepemimpinan SBY Dalam Koran Tempo (Analisis Framing Fungsi Kepemimpinan Presiden SBY Dalam Koran Tempo Periode 4 Februari- 3 April 2013) yang disusun oleh Zuanita Maharani Putri, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam skripsi ini peneliti menjadikan berita tentang kepemimpinan SBY sebagai obyek, adapun model analisis *framing* yang digunakan dalam penelitian ini *framing* model Entman. Hasil dari penelitian ini *koran Tempo* bukan menjadi koran yang pro, kontra, maupun netral, akan tetapi koran Tempo disini lebih mengkritisi bagaimana kepemimpinan SBY selama menjabat sebagai Presiden. *Koran Tempo* dengan lihai memilih narasumber kompeten yang diperkirakan akan menyuarakan kritikan dan menyeleksi opininya sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan media kepada masyarakat.

---

<sup>13</sup> Dian Muslimah, *Konstruksi Berita Konflik Pasca Bencana Alama Pada Harian Kompas*, Tesis diajukan pada Program Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2013).



Fungsi kepemimpinan SBY pada periode 4 Februari – 3 April 2013 yang berbarengan dengan kisruh Demokrat menjadi sorotan *Koran Tempo* sebagai media yang mengkilatkan kepentingan publik dan Indonesia yang lebih baik dalam setiap pemberitaannya. Saat itu masyarakat mempertanyakan bagaimana fungsi kepemimpinan SBY berjalan di tengah kisruh partainya. Oleh karena itu timbul rumusan masalah, bagaimana konstruksi kepemimpinan SBY dalam *Koran Tempo* terutama dari artikel bertopik ‘kepemimpinan SBY’ periode 4 Februari – 3 April 2013<sup>14</sup>

*Ketiga*, penelitian berjudul Konstruksi Media Berita Online Terhadap Pemberitaan Perempuan (Analisis Framing okezone.com dan kompas.com Terhadap Pemberitaan Perempuan Dalam Kasus Korupsi Impor Daging Sapi) oleh Kartika Suci Lestari Parhusip mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Dalam penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Entman sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pemberitaan seputar perempuan oleh okezone.com dan kompas.com. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat persamaan dan perbedaan dalam memberitakan sebuah wacana. Pada okezone.com menjelaskan masalah keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi merupakan permasalahan hukum yang juga menekankan pada gratifikasi seks. Sedangkan kompas.com kasus perempuan ini tidak ada

---

<sup>14</sup> Zuanita Maharani, *Fungsi Kepemimpinan SBY dalam Koran Tempo (Analisis Framing Fungsi Kepemimpinan Presiden SBY dalam Koran Tempo Periode 4 Februari- 3 April 2013)*, Skripsi tidak diterbitkan, ( Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013).

kaitannya dengan masalah gratifikasi seksual. Hal ini terlihat dari beberapa narasumber yang dipilih kompas.com.<sup>15</sup>

## G. Kerangka Teori

### 1. Konstruksi Realitas Media Massa

Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang di konstruksikan.<sup>16</sup>

Media massa menjadi media komunikasi politik serta sumber informasi disamping menjadi saluran komunikasi bagi para politisi. Cara media menampilkan peristiwa-peristiwa politik dapat mempengaruhi persepsi para politisi dan masyarakat mengenai perkembangan politik.<sup>17</sup> Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan makna tertentu. Jika dipahami, seluruh isi media baik cetak maupun elektronik menggunakan bahasa

---

<sup>15</sup> Kartika Suci, *Konstruksi Media Berita Online Terhadap Pemberitaan Perempuan (Analisis Framing Okezone.com dan Kompas.com Terhadap Pemberitaan Perempuan dalam Kasus Korupsi Impor Daging Sapi)*, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2014).

<sup>16</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 88.

<sup>17</sup> Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa : Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 8.

verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa non verbal (gambar, foto, grafik, angka dan tabel). Keberadaan bahasa dalam media massa dapat menentukan gambaran (citra) mengenai suatu realitas-realitas media yang akan muncul dibenak khalayak.<sup>18</sup>

Proses kontruksi realitas pada prinsipnya adalah setiap upaya menceritakan sebuah peristiwa, keadaan, atau benda. Karena media massa adalah sebuah institusi yang bertujuan untuk menceritakan peristiwa-peristiwa, maka tugas utama dari media massa adalah mengkonstruksikan berbagai realitas yang disiarkan. Media bertugas menyusun berbagai realitas-realitas yang ditemukan di lapangan, kemudian menyusun realitas tersebut hingga menjadi cerita atau wacana bermakna.<sup>19</sup>

## 2. Framing Sebagai Konsep

Analisis *framing* atau dikenal juga sebagai bingkai adalah studi yang mendalam untuk mengkaji bagaimana isi teks media yang ditampilkan kepada khalayak.<sup>20</sup> Analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Pada awalnya *framing* ini dimaknai sebagai perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974 yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.12.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>20</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*, (Yogyakarta : LKIS, 2009), hlm. 127.

mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku yang membimbing individu dalam memaknai realitas.<sup>21</sup>

Sebagai sebuah konsep, dalam praktiknya analisis *framing* adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan kosntruksikan oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu hasil akhirnya adalah adanya bagian yang ditonjolkan dan lebih mudah untuk dipahami. Dampaknya khalayak akan lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan oleh media. *Framing* itu sendiri bukan murni kajian ilmu komunikasi akan tetapi diadaptasi dari ilmu psikologi.

Dalam perspektif studi komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, dan lebih diingat. Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana bertita tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. 219.

<sup>22</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 162.

Framing menurut Entman berarti memilih beberapa aspek dari realitas yang terpersepsikan dan membuatnya lebih penting dalam suatu pengkomunikasian teks, sedemikian rupa untuk mempromosikan definisi tertentu tentang suatu persoalan, interpretasi, penilaian moral, dan pemberian saran.<sup>23</sup>

### 3. Teori Konflik

Konflik adalah adanya pertentangan yang timbul di dalam seseorang (masalah intern) maupun dengan orang lain (masalah ekstern) yang ada di sekitarnya. Konflik dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antar kedua belah pihak, sampai kepada mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing.<sup>24</sup>

Konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe. Kedua tipe ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. Yang dimaksud dengan politik positif ketika konflik itu tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disepakati bersama dalam konstitusi. Sebaliknya, konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 186.

<sup>24</sup> <https://www.academia.edu/5360183/pengertian-konflik.html> diakses pada Rabu, 21 Januari 2015.

<sup>25</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami ilmu Politik*, (Jakarta : Grasindo. 2013), hlm. 195.

Menurut Lewis A. Coser, bahwa konflik yang terjadi di dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif saja, tetapi dapat pula menimbulkan dampak positif. Oleh karena itu, konflik bisa menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Dan konflik adalah salah satu bentuk interaksi dan tak perlu diingkari keberadaannya. Bagi Coser dengan adanya konflik dapat menguatkan rasa kekeluargaan atau persaudaraan para anggota.<sup>26</sup>

Dalam teori konflik Lewis Coser dikenal dengan *safety valve* atau katup penyelamat. Yang dapat diartikan sebagai jalan keluar yang digunakan untuk meredakan permusuhan. Dengan adanya katup penyelamat tersebut, kelompok-kelompok yang bertikai dapat mengungkapkan penyebab dari munculnya konflik tersebut dan mencoba mencari solusi atau cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan adanya *safety valve* ini maka kedua belah pihak yang terlibat konflik dapat kembali bersatu, lebih dari itu kedua belah pihak ini justru memiliki hubungan yang lebih erat dari sebelumnya.<sup>27</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah analisis isi kritis dengan pendekatan kualitatif. Peneliti akan menganalisis pemberitaan pada *SKH Republika*

---

<sup>26</sup> Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007), hlm .45.

<sup>27</sup> [https://www.academia.edu/8893218/teori\\_konflik\\_sosial](https://www.academia.edu/8893218/teori_konflik_sosial) diakses pada hari Senin, 26 januari 2015.

mengenai konflik PPP pasca pemilu legislatif 2014. Kemudian penulis akan menyimpulkan hasil dari analisis tersebut.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yakni data utama dan data pelengkap.

### a. Data Utama

Sumber data utama pada penelitian ini adalah seluruh teks berita yang berjumlah sepuluh pada *SKH Republika* yang berhubungan dengan pemberitaan konflik PPP pasca pemilu legislatif 2014 edisi bulan April- Mei 2014.

### b. Data Pelengkap

Data pelengkap pada penelitian ini adalah buku-buku referensi, koran, laporan atau jurnal yang relevan dengan obyek kajian, sumber berita lain dari berbagai media dan internet.

## 3. Objek dan Subjek Penelitian

### a. Objek Penelitian

Objek penelitiannya adalah seluruh berita yang berkaitan dengan konflik PPP pasca pemilu legislatif. Adapun beberapa berita yang dimaksud adalah :

1. *Nasib SDA ditentukan di Mukernas III PPP* edisi 11 April 2014
2. *Internal PPP Diserukan Islah* edisi 15 April 2014
3. *PPP Fokus Garap Koalisi* edisi 16 April 2014



4. *Beredar SK Pemecatan* edisi 17 April 2014
5. *SDA Diperingatkan, Dukungan ke Prabowo Dianggap Ilegal* edisi 20 April 2014
6. *Jangan Tutup Islah* edisi 21 April 2014
7. *SDA Buka Pintu Islah, Romi Gelar Mukernas* edisi 22 April 2014
8. *Islah PPP Kaburkan Koalisi Dengan Gerindra* edisi 23 April 2014
9. *Kemana Partai Ka'bah Berlindung* Edisi 9 Mei 2014
10. *Koalisi PPP Tanpa Syarat* edisi 16 Mei 2014

b. Subjek Penelitian

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah *SKH Republika*.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep *framing* yang menekankan pada isu, dan penonjolan aspek-aspek pada *SKH Republika* terhadap pemberitaan seputar konflik PPP pasca pemilu legislatif 2014. Adapun perangkat *framing* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman.

Dalam konsep Robert N. Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan

rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir tertentu pada suatu peristiwa yang diwacanakan.

**Tabel 1.1**

**Elemen-elemen Analisis *Framing* Robert N. Entman**

<i>Define Problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah?
<i>Treatment recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut?

Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik dan lebih diingat oleh khalayak. Konsepsi mengenai *framing* dari Entman tersebut menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan.

*Define problems* (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai *framing*. Elemen ini merupakan *master frame* / bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan.

*Diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa.

*Make moral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut.

*Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Penggunaan *framing* model Robert N. Entman pada penelitian ini dikarenakan akan terlihat *SKH Republika* membingkai permasalahan konflik PPP pasca pemilu legislatif menggunakan empat elemen yakni melihat kasus PPP dari pendefinisian masalah, siapa aktor yang terlibat, nilai moral yang disajikan, serta bagaimana surat kabar memberikan penyelesaian terhadap masalah tersebut.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat untuk mempermudah teknik penulisan penelitian ini sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah. Agar memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi berjudul “Konflik PPP Pasca Pemilu Legislatif dalam SKH Republika Edisi April-Mei 2014” akan diuraikan mengenai sistematika pembahasannya.

BAB I berisi pendahuluan terdiri atas penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang gambaran *SKH Republika* meliputi visi misi, rubrik, struktur redaksi. Kemudian gambaran umum PPP serta kronologi pemberitaan konflik PPP pasca pemilu legislatif 2014.

BAB II, berisi tentang analisis berita dan memaparkan *frame* yang digunakan oleh media dalam membingkai konflik PPP pasca pemilu legislatif 2014.

BAB IV, berisi kesimpulan penelitian dan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. terdapat pula saran-saran guna perbaikan kualitas hasil penelitian di masa yang akan datang.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Selama edisi April hingga Mei 2014, *SKH Republika* mempublikasikan sepuluh berita terkait konflik PPP pasca pemilu legislatif. Dari sepuluh berita yang penulis analisis, dinilai cukup menggambarkan jalannya kasus konflik PPP pasca pemilu legislatif. Sepuluh berita tersebut dianalisis menggunakan *framing* model Robert N. Entman. Pada pemberitaan-pemberitaan tersebut, terdapat *frame* tertentu yang ditonjolkan *SKH Republika*. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari ideologi dan kepentingan dari *SKH Republika* sebagai media massa.

Pemberitaan-pemberitaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *frame* yang dibentuk oleh *SKH Republika* dalam kasus konflik PPP pasca pemilu legislatif adalah masalah politik dan hukum. Dalam membingkai konflik PPP tersebut *SKH Republika* lebih menengahi konflik yang berseteru antar dua kubu, yakni kubu Suryadharma Ali dan Kubu Romahurmuziy. Sebagai surat kabar harian berideologi keislaman, kebangsaan, dan kerakyatan. Islah merupakan cara yang digunakan *SKH Republika* dalam penyelesaian konflik yang terdapat PPP berkaitan dengan ideologi keislaman, sedangkan dari segi kebangsaan *SKH Republika* selalu berupaya untuk menyatukan kembali antar kubu PPP yang terpecah belah, melihat PPP merupakan salah satu partai politik yang

turut andil dalam proses demokrasi di Indonesia. Dari segi kerakyatan *SKH Republika* prihatin terhadap konflik yang terdapat di PPP. Seharusnya PPP bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi partai lain serta dapat mewakili aspirasi umat muslim.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa pemikiran yang penulis sampaikan sebagai saran, diantaranya adalah :

1. Penelitian ini dapat dikatakan memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi. Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda dalam menginterpretasikan sebuah pemberitaan, dengan demikian, penulis selanjutnya diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai analisis *framing*. Sehingga nantinya analisis *framing* dapat diaplikasikan dalam menilai sudut pandang atau ideologi media massa melalui pemberitaannya.
2. Penelitian menggunakan analisis *framing* bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Namun dari situ dapat diambil pelajaran serta pengetahuan untuk menganalisis pemberitaan. Penulis selanjutnya diharapkan dapat menambah kajian-kajian, khususnya analisis *framing* agar lebih menambah wawasan.
3. Penulis diharapkan dapat bersikap lebih baik dalam melakukan penelitian terhadap analisis *framing*. Karena analisis *framing* sangat penting jika digunakan untuk melihat hasil konstruksi yang dilakukan oleh media massa.

### **C. Solusi**

Kasus konflik PPP pasca pemilu legislatif tentunya menimbulkan rasa keprihatinan dari umat muslim. Sebagai partai politik yang seharusnya menjadi wakil dari aspirasi masyarakat, harus berseteru karena sikap ketua umum partai yang hadir dalam partai lain. PPP yang menjadi salah satu partai islam yang ikut berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2014 seharusnya bisa memberikan kontribusi dan menyumbangkan aspirasi dari umat muslim.

Semestinya hal tersebut, tidak berlarut-larut. Dan segera ada *i'tikad* baik dari kedua kubu untuk melakukan islah. Sebagai partai islam harusnya bisa memberikan suri tauladan kepada partai lain. hal ini menunjukkan bahwa partai islam itu dapat selalu bersatu dan dapat menjadi wakil yang baik bagi umat islam untuk memajukan negara Indonesia.

### **D. Penutup**

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Sang Maha Kuasa atas segala kenikmatan, kemudahan, serta rahmat dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekeliruaan yang penulis buat. Oleh sebab itu, semoga dari kesalahan tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk hidup yang lebih baik esok hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

Abdul Aziz, *Politik Islam Politik Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana,

Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta; LKIS, 2006.

Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, cetakan keempat, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

\_\_\_\_\_, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKIS, 2009

Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa : Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*, Jakarta: Granit, 2004.

Margaret Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LKIS, 2008

Peg Pickering, *How to Manage Conflict*, Jakarta: Esensi, 2006

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2013.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Media Grafika,



### Skripsi dan Tesis

Dian Muslimah, “Konstruksi Berita Konflik Pasca Bencana Alam Pada harian *Kompas*” *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2013.

Kartika Suci, “Konstruksi Media Berita Online Terhadap Pembertitaan Perempuan (Analisis Framing okezone.com dan kompas.com Terhadap Pemberitaan Perempuan Dalam Kasus Korupsi Impor Daging Sapi)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2014

Zuanita Maharani, “Fungsi Kepemimpinan SBY Dalam Koran Tempo (Analisis Framing Fungsi Kepemimpinan Presiden SBY Dalam Koran Tempo Periode 4 Februari- 3 April 2013)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2013.

### Internet

<http://PPPMadiun.com/2010/12/sejarah-partai-persatuan-pembangunan.html>,  
Akses 25 oktober 2014.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Republika\\_%28surat\\_kabar%29](http://id.wikipedia.org/wiki/Republika_%28surat_kabar%29). ,akses 30 Oktober 2014.

<http://www.pemilu.com/hasil-pemilu-2014/>, akses 3 November 2014.

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/23/mdxhpd-ensiklopedi-hukum-islam-islam-1>, akses 15 Februari 2015.

<http://ppp.or.id/page/ppp-dalam-lintasan-sejarah/index/>, akses 3 April 2015

<http://www.merdeka.com/tag/k/kisruh-ppp/kh-maimun-zubair-saya-sedih-dan-menangis-melihat-konflik-ppp.html>, akses 20 Januari 2015.

<https://www.academia.edu/5360183/pengertian-konflik.html>, akes 21 januari 2015.

**Koran**

“Nasib SDA ditentukan di Mukernas III PPP” *SKH Republika*, edisi 11 April 2014

“Internal PPP Diserukan Islah” *SKH Republika*, edisi 15 April 2014

“PPP Fokus Garap Koalisi” *SKH Republika*, edisi 16 April 2014;

“Beredar SK Pemecatan” *SKH Republika*, edisi 17 April 2014

“SDA Diperingatkan, Dukungan ke Prabowo Dianggap Ilegal” *SKH Republika*, edisi 20 April 2014

“Jangan Tutup Islah” *SKH Republika*, edisi 21 April 2014

“SDA Buka Pintu Islah, Romi Gelar Mukernas” *SKH Republika* edisi 22 April 2014

“Islah PPP Kaburkan Koalisi Dengan Gerindra” *SKH Republika*, edisi 23 April 2014

“Kemana Partai Ka’bah Berlindung?” *SKH Republika*, edisi 9 Mei 2014

“Koalisi PPP Tanpa Syarat” *SKH Republika*, edisi 16 Mei 2014

## Nasib SDA Ditentukan di Mukernas III PPP

JAKARTA — Manuver politik Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) merapat ke Partai Gerindra sebelum pemilu legislatif menuai reaksi internal partai. Sebagian besar pengurus pusat dan wilayah partai berlam-bang Ka'bah itu menuntut sanksi diberikan kepada ketua umum mereka saat Mukernas III PPP yang akan digelar akhir April ini.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Emron Pangkapi mengungkapkan, 27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 34 DPW PPP akan mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Jakarta untuk memberi masukan sikap tegas tersebut, Jumat ini. "Kami (DPP) menerima masukan dulu dari 27 DPW apa yang dikeluhkan terkait sikap politik Ketua Umum sebelum pemilu legislatif (pileg) yang akhirnya blunder di internal ini," kata Emron kepada *Republika*, Rabu (9/4) malam.

Setelah menerima masukan DPW tersebut, kata dia, kemudian seluruh DPP, termasuk ketua umum, akan membahas masalah ini. Dan, akan menjadi bahan evaluasi pada Mukernas III PPP akhir April, yang juga membahas capres dan kemungkinan koalisi dengan partai lain.

Ia pun mengungkapkan, dari aturan partai kemungkinan ada beberapa sanksi yang mungkin bisa dikenakan. Mulai dari sanksi ringan berupa teguran hingga berat seperti pemberhentian.

■ amri amrullah **ed:** muhammad fakhruddin



# Internal PPP Diserukan Islah

■ Irfan Fitrat, Amri Amrullah

**Suryadharma mengindikasikan ada pihak di luar yang berusaha menggoyang partai.**

JAKARTA — Kehadiran Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali ke kampanye terbuka Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Jakarta, berbuntut panjang. Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi melancarkan kritik keras dan sebanyak 27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP menyerukan pertanggungjawaban Suryadharma.

Atas adanya gejolak internal ini, Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy memberikan bantahan. Ia menyangkal kabar adanya manuver politik dari pihak tertentu di internal partainya. "Yang ada hanya perbedaan dalam memaknai kehadiran ketua umum ke Gelora Bung Karno saat kampanye terbuka," kata politisi yang akrab dipanggil Romy itu dalam keterangan pers tertulisnya, Senin (14/4).

Romy juga membantah adanya upaya pemakzulan terhadap Suryadharma. Wacana akan adanya pemecatan fungsionaris PPP pun disangkal anggota DPR RI dari Fraksi Partai PPP itu.

Namun, ia tidak menampik adanya perbedaan pendapat dalam partai berlambang Ka'bah tersebut. "Penyelesaian beda pendapat ini akan dilakukan secara musyawarah menuju islah," ujarnya.

Menurut Romy, PPP sudah berpengalaman dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Ia berharap perbedaan kali ini pun dapat diselesaikan dengan damai dan bermartabat. "PPP akan segera menyelesaikan perbedaan pendapat ini," kata Ketua Komisi IV DPR RI itu.

Langkah politik yang dilakukan Suryadharma dengan datang ke kampanye terbuka Partai Gerindra dinilai memengaruhi perolehan suara PPP pada pemilu legislatif (pileg) tahun ini. Berdasarkan hasil hitung cepat Saiful Mujani Research & Consulting, PPP mendapat perolehan suara 6,32 persen. Sedangkan, DPP PPP sebelumnya menargetkan raihan suara lebih dari 10 persen.

Suryadharma Ali mengindikasikan ada pihak di luar PPP yang berusaha menggoyangkan partai berlambang Ka'bah ini untuk mencari peluang kekuasaan di pemilu presiden (pilpres) mendatang. Namun, ia enggan mengungkapkan siapa pihak luar tersebut.

Menurutnya, pihak luar itulah yang saat ini berusaha menggoyang PPP seolah memvonis dirinya dan Djan Faridz salah mengambil langkah politik ketika menghadiri kampanye akbar Gerindra bersama Prabowo Subianto di Gelora Bung Karno 23 Maret lalu. Suryadharma mengatakan, kesalahan yang dituduhkan kepada dirinya dan Djan Faridz terlalu mengada-ada.

## Pleno batal

Rapat Pleno PPP yang rencananya akan menentukan nasib Suryadharma batal digelar pada Senin (14/4) malam. Dengan

ditundanya rapat pleno PPP ini, posisi Suryadharma sebagai ketua umum PPP tidak berubah.

"Karena ada sesuatu hal yang bisa dimaklumi dari ketua umum, maka rapat malam ini batal dilaksanakan dan akan dilaksanakan di lain hari," ujar Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi.

Hal ini karena tidak kuorumnya pengurus DPW yang hadir di DPP PPP. Selain itu, karena adanya pemberitahuan dari ketua umum PPP. "Jadi, Pak Ketum sendiri yang memberitahukan kalau rapat diundur," katanya menjelaskan.

Menurut Emron, meski pembatalan rapat oleh ketua umum melalui pesan singkat, tetap saja sah. "Kami masih menghargai Pak SDA sebagai ketua PPP," ujarnya.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan bahwa menjelang pilpres, PPP harus solid atau akan kehilangan kredibilitas di kalangan publik dan parpol lain. Adanya dukungan Suryadharma Ali ke Prabowo Subianto dan dukungan DPW PPP ke Joko Widodo dinilai menjadi preseden buruk. "Konstituen PPP nanti akan menganggap parpol tersebut pragmatis dan oportunistis," ujar Siti.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi mengatakan bahwa konflik internal menjadi urusan rumah tangga PPP. Pihaknya enggan ikut campur dalam mengarahkan dukungan parpol berbasis massa Islam tersebut. "Apakah ada unsur pragmatis dari PPP, biarkan menjadi sikap internal partai," katanya. ■ andi mohammad

ikhbal ed: muhammad fakhruddin

# PPP Fokus Garap Koalisi

■ Amri Amrullah,  
Indah Wulandari

**Suryadharma Ali dan Emron Pangkapi kompak menyambut capres dari PKB, Rhoma Irama, di kantor PPP.**

JAKARTA — Ketegangan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedikit mengendur. Pertemuan hangat antara Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyiratkan bahwa persoalan internal PPP mencair di antara keduanya, dan kini tengah fokus menggarap koalisi.

Keduanya terlihat kompak menyambut salah satu calon presiden (capres) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rhoma Irama, di kantor pusat PPP. Mereka kemudian menggelar pertemuan tertutup dengan Rhoma Irama.

Suryadharma Ali enggan berbicara banyak terkait kedatangan Rhoma. Namun, SDA tidak membantah kalau musisi kawakan itu tengah berikhtiar

meminta dukungan untuk mendapatkan tiket capres. "Semua mungkin terjadi. Tunggu saja, ya," kata Suryadharma, Selasa (15/4).

Terkait geliat sejumlah capres dan calon wakil presiden yang gencar melakukan komunikasi politik, Suryadharma mengaku tidak takut tertinggal. Dia mengungkapkan telah melakukan pembicaraan lebih mendalam terkait berbagai perkembangan di internal partainya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. "Yang dibicarakan masalah 'dapur' partai," ujarnya.

Ia pun tidak menampik jika komunikasi tersebut dinilai semakin mendekatkan ke arah mana koalisi kedua partai tersebut. "Kita semakin dekat sekali, walau belum bisa dinyatakan final," terangnya.

Sementara itu, mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengaku punya impian agar partai politik berbasis massa Islam bersatu menghadapi Pemilu Presiden 2014. Syaratnya, kata dia, PPP sebagai salah satu parpol Islam harus bebas masalah. "PPP harus sehat. Andai PKB, PPP, dan

PKS sebenarnya bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, tapi kenyataan masih banyak masalah," ujarnya.

**Jika masalah internal diselesaikan sekarang, akan rawan intervensi pihak luar. Kelompok 'islamofobia' juga akan tertawa melihatnya.**

**KH Hasyim Muzadi**  
Mantan ketua umum PBNU

Dia berharap kemelut di internal PPP tidak berlarut-larut. Ia meminta masalah internal itu diselesaikan secara damai. "Sebagai orang yang pernah aktif di PPP tahun 1973-1986, saya sangat prihatin dan menyesalkan kemelut pertikaian di PPP," katanya.

Menurutnya, jika Surya-

dharma Ali dianggap salah karena hadir pada kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno (GBK), masalah tersebut sebaiknya diselesaikan setelah pemilu presiden. "Jadi, hendaknya diselesaikan sehabis pilpres, sekalipun dalam muktamar luar biasa," ujarnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang dan Depok itu khawatir, jika masalah tersebut diselesaikan sekarang, akan rawan intervensi pihak luar. "Kalau sekarang akan 'masuk angin' dengan kepentingan makro di luar PPP. Bahkan, kelompok 'islamofobia' juga akan tertawa melihatnya," katanya.

Hasyim menambahkan, setiap kemelut di partai politik atau politik praktis selalu rawan politik transaksional. "Itu bisa menghancurkan PPP sendiri dalam jangka panjang, sekalipun pengurusnya bergantian," ujarnya.

Sebagai orang yang pernah besar di PPP, Hasyim berkepentingan menyelamatkan PPP dari kehancuran karena perpecahan. "Saya tidak semata-mata membela Surya, tapi saya bela keselamatan PPP," katanya.

■ ed: muhammad fakhrudin



# Beredar SK Pemecatan

■ Mansyur Faqih

**Soeharso tidak merasa melakukan pelanggaran terhadap AD/ART PPP.**

JAKARTA — Ketegangan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian meruncing. Bahkan, beredar surat keputusan diduga berasal dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Suryadharma Ali (SDA) yang memecat Wakil Ketua Umum Soeharso Monoarfa dan ada empat ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) lainnya.

Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha membenarkan adanya pemecatan Soeharso Monoarfa dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PPP. Pemecatan Soeharso dan keempat ketua DPW itu buntut konflik internal yang ingin melengserkan Suryadharma Ali dari jabatan ketua umum. "Ya benar, ada surat pemecatan yang

ditandatangani, Rabu dini hari, tadi oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali," kata Tamliha saat dihubungi, Rabu (16/4).

Dia mengatakan, empat Ketua DPW PPP yang dipecat adalah Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatra Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.

Namun, keberadaan surat itu dibantah Wakil Ketua Umum Bidang Internal PPP Emron Pangkapi. "Sampai hari ini tak ada surat keluar, apalagi itu surat pemberhentian," katanya.

Ia mengaku, sudah melakukan pertemuan dengan Sekjen PPP M Romahurmuziy serta sekretariat partai. Dipastikan, keduanya tak merasa membubuhkan tanda tangan untuk surat apa pun. "Dua hari ini *nggak* ada itu surat keluar. Kalau ada surat yang bilang ada yang dipecat, itu surat bodong. Karena, aturannya untuk surat keputusan itu harus

## PENGURUS YANG DISEBUT DI SK

Wakil Ketua Umum Soeharso Monoarfa  
Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin  
Ketua DPW PPP Sumatra Utara Fadli Nursal  
Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer  
Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara

ada tanda tangan sekjen dan ketua," papar dia.

Untuk urusan internal, lanjutnya, harus ada tanda tangan waketum bidang internal. Sementara, untuk surat keluar harus ada tanda tangan waketum bidang eksternal. "Jadi, bagaimana kita mengomentari surat bodong? Saya ini waketum bidang internal. *Gak* pernah saya itu tanda tangan. Jadi, barangnya *nggak* ada," paparnya.

Ia pun memastikan, tak ada perubahan posisi di struktur kepemimpinan partai.

Wakil Ketua Umum PPP Soeharso Monoarfa mengaku belum menerima surat pemecatan dirinya yang dikeluarkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

"Sampai detik ini saya belum

menerima suratnya. Saya tahu kabar itu dari media massa," kata Soeharso.

Soeharso menilai, surat pemecatan itu sangat ganjil karena dikeluarkan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan tanpa tandatangan Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy.

"Biasanya, prosedur pemecatan itu ada peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi, ini secara tiba-tiba saja ada kabar pemecatan saya dan empat Ketua DPW. Ada apa ini. Lagi pula, kabarnya tidak ada tanda tangan sekjen juga, padahal pemecatan itu harus ditandatangani ketua umum dan sekjen," katanya.

Soeharso tidak merasa melakukan pelanggaran terhadap AD/ART partai. Hingga saat ini, dia menganggap, tidak ada pemecatan terhadap dirinya.

"Kalau mau menuntut, apa yang mau dituntut. Saya menganggap surat itu tidak pernah ada karena memang saya tidak menerima suratnya," kata dia.

■ antara ed: muhammad fakhruddin

# SDA Diperingatkan, Dukungan ke Prabowo Dianggap Ilegal

■ Erdy Nasrul

JAKARTA — Dukungan pernyataan koalisi yang disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menuai kecaman. Pengurus pusat PPP menganggap dukungannya itu ilegal (tidak sah). "Itu jelas ilegal," kata Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, di Jakarta, Sabtu (19/4).

Emron menegaskan, PPP bukan milik pribadi, melainkan alat perjuangan umat. Karena itu, kata dia, langkah SDA mendukung Prabowo dianggap menyalahi aturan partai karena tanpa ada koordinasi dengan pengurus lainnya. "Kalau se-

cara pribadi silakan, tapi jangan membawa nama PPP," kata dia.

Berkenaan dengan manuver SDA itu dan sepek terjang yang memecat sejumlah pengurus DPP dan DPW PPP, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP di Jakarta, Sabtu (19/4).

Dalam rapimnas itu, pengurus DPP PPP yang hadir antara lain, Sekjen PPP Romahurmuziy (Romy), Waketum Subharso Monoarfa, Waketum Emron Pangkapi, Waketum Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Dewan Majelis Pakar DPP PPP Zarkasih Noor, dan lainnya.

Romy menegaskan, rapimnas ini diselenggarakan sesuai aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Ada dua agenda utama rapim-

nas, yakni evaluasi hasil pilleg dan konflik internal PPP. Evaluasi konflik internal partai terkait manuver politik SDA yang membawa PPP berkoalisi dengan Gerindra. Penyelesaian dilakukan dengan islah dan tabayun. Jajaran pengurus PPP akan memberikan kesempatan kepada SDA untuk memberikan klarifikasi atas sejumlah manuver politik yang dilakukannya.

"SDA harus memberikan jawaban. Ini peringatan karena langka-langkahnya telah menyalahi aturan partai," ujar Romy. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan dan klarifikasi dari SDA.

Terkait masalah internal ini, Romy menegaskan, PPP belum menentukan koalisi pada parpol atau capres tertentu. "Sesuai amanat

**Rapimnas PPP membahas evaluasi pilleg dan konflik internal.**

melihat kondisi perpolitikan dan dinamika internal PPP. Ia pun memampik bila rapimnas ini berupaya menggulingkan posisi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Ketua DPP PPP Epyardi Asda mengatakan, sosok Prabowo layak menjadi pemimpin nasional. "Beliau kami lihat bisa mengangkat martabat bangsa ke depan," ujar dia, di Jakarta, Sabtu (19/4).

Sebelumnya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali memecat sejumlah elite PPP. Mereka, antara lain, yaitu Waketum Emron Pangkapi, Subharso Monoarfa, Lukman Hakim Syaifuddin, Sekjen Romahurmuziy, serta sebagian besar ketua DPW. SDA kemudian mengangkat Djan Faridz sebagai waketum.

■ gilaang akbar/prambad/arni amr/uliah ed: syahrudin el-fitri

Mukernas II PPP di Bandung, penetapan dukungan capres dipusatkan di rapimnas dan rapimnas baru digelar Sabtu (kemarin) di kantor DPP PPP, ujar dia.

Ketua Komisi IV DPR RI ini mengakui, rapimnas yang digelar kali ini sengaja dipercepat karena



# JANGAN TUTUP ISLAH



**Indepth**

**Pro-kontra  
Prabowo-SDA  
Kunjungi Mbah Mun**

Hlm- 8

**Ke Mana Imajinasi  
Politikus Islam?**

Hlm- 9

**23 MARET 2014**

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali bersama Djan Faridz dan Nur Muhammad Iskandar menghadiri kampanye akbar Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. SDA pun ikut berorasi di GBK.

**9 APRIL 2014**

Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menggelar konferensi pers memprotes keras kehadiran SDA pada kampanye akbar Gerindra. Hasil hitung cepat menunjukkan hasil perolehan suara PPP berada pada kisaran lima sampai enam persen.

**13 April 2014**

Sebanyak 27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP menyatakan kekecewaannya atas langkah SDA menghadiri kampanye akbar Gerindra. Ketua DPW PPP Jawa Barat Rachmat Yasin menilai, kehadiran SDA di kampanye Gerindra melemahkan semangat kader PPP di daerah jelang hari pencoblosan.

**15 APRIL 2014**

Terjadi adu mulut antara Ketua DPW PPP Jakarta Lulut Lunggana (kubu SDA) dan Rachmat Yasin di kantor DPP PPP, Jakarta. Lulut memprotes adanya mosi tidak percaya dari 27 DPW PPP.

**16 APRIL 2014**

SDA memecat Wakil Ketua Umum Suharsno Manoaifa dan empat ketua DPW PPP, termasuk Rachmat Yasin yang dinilai tengah mengupayakan pemakzulan ketua umum.

**18 APRIL 2014**

SDA secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada capres Partai Gerindra Prabowo Subianto.

**20 APRIL 2014**

Raprimnas PPP memutuskan memberhentikan sementara Ketua Suryadharma Ali dan menyerahkan jabatan kepada Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas (plt) sampai muktamar digelar.

**19 APRIL 2014**

Dukungan SDA kepada Prabowo langsung direpsons dengan rapat harian pengurus DPP PPP. Rapat dipimpin Sekjen PPP Romahurmuzyi menghasilkan sembilan butir kesimpulan yang salah satunya menilai dukungan SDA kepada Prabowo melanggar AD/ART.

## LINI MASA KONFLIK PARTAI KA'BAH

Sumber: Pusat Data Republik. Pengolah: Andi Saubani. Ilustrasi: Dan Yehya/Republika

■ Andi Mohammad Ikbal, Irfan Fitrat

**Bachtiar Chamsyah sudah bertemu SDA dan Romahurmuzyi.**

JAKARTA — Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin meruncing menyusul keputusan pemberhentian sementara Suryadharma Ali (SDA) dari jabatan ketua umum PPP. Keputusan diadukan dalam rapat pimpinan nasional yang dipimpin Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzyi di kantor DPP PPP pada Ahad (20/4). Partai berlabel Ka'bah itu pun diimbau untuk islah.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PPP Bachtiar Chamsyah mengaku prihatin dengan kisruh di partainya. Karena itu, dia bertekad

akan menyelesaikan konflik agar tidak berlanjut. "Saya ingin menyelesaikan ini (kisruh internal) dengan baik," kata Bachtiar, kepada *Republika*, Ahad (20/4).

Bachtiar mengaku, dirinya sudah ditemui oleh SDA dan Romi, panggilan Romahurmuzyi. Namun, dia menolak menerangkan hasil pembicaraan dengan dua petinggi PPP yang tengah berseteru itu.

Kalangan pengamat politik menilai, jalan islah harus diambil oleh para petinggi partai berbasis massa umat Islam itu. Salah satu saran islah datang dari pengamat politik dari Political Communication (Polcomm) Institute, Heri Budianto, yang menilai konflik berisiko menghancurkan soliditas partai. "Acuannya adalah keputusan mukemas dan AD/ART di dalam PPP sendiri."

Direktur Eksekutif Lingkaran Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, di dalam tubuh PPP sekarang ada perbedaan antara

dua kubu yang sama kuat. Namun, ia melihat, persoalan yang ada masih bisa diselesaikan dengan baik. "Islah mungkin, tapi harus kembali ke titik nol," ujar Ray.

Kondisi internal PPP mulai memanas pasca kedatangan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) ke kampanye akbar Partai Gerindra. Ia mengatakan, sejumlah orang mempertanyakan langkah itu di kala PPP akan menghadapi pemilu legislatif. "Sayangnya itu bukan dijawab Pak Suryadharma, malah yang dilakukan adalah pemecatan. Itu blunder," kata dia.

Pengurus DPP PPP dari kubu SDA menginginkan suara partai politik tersebut kembali bersatu. Pihaknya pun akan menggelar pertemuan dengan mengundang kubu Romahurmuzyi pada Selasa (22/4) mendatang. "Saya sangat berharap PPP ini bisa kembali bersatu. Hari Selasa, rencananya akan ada pertemuan, ketua SDA akan mengun-

ding mereka untuk hadir."

Romi yang dihubungi kemarin menegaskan dirinya tidak menutup pintu islah. Permasalahan PPP saat ini, kata Romi, bisa diselesaikan dengan cara yang baik. "Saya kira, sebagai umat Islam, jangan pernah menutup pintu islah. Jangan sampai menutup islah."

Raprimnas PPP menyerahkan jabatan ketua umum kepada Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi. Emron bertugas sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum sampai pelaksanaan muktamar Raprimnas memberikan mandat kepada plt ketua umum untuk segera menyelenggarakan musyawarah kerja nasional sebelum Pilpres 2014. Adapun, SDA menilai, Raprimnas PPP yang menghasilkan keputusan memberhentikan dirinya dari jabatan ketua umum adalah tidak sah. "Seharusnya hal itu dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa PPP!" ■ Bambang norroyono/c62/c64/antara ed: andi saubani





# Islah PPP Kaburkan Koalisi dengan Gerindra

■ Andi Mohammad Ikhsal,  
Erik Purnama Putra

JAKARTA — Pintu menuju islah antara dua kubu yang berseteru di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terbuka. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) mengatakan, rapat pleno Selasa (22/4) memutuskan, islah atau damai dengan kubu Sekjen Romahurmuziy harus ditamakan.

“Tadi, Wakil Ketua Umum PPP Hazrul Azwar telah mendapat SMS (layanan pesan singkat) dari Romahurmuziy,” kata SDA di kantor DPP

PPP, Jakarta. Isi SMS dari Romi itu adalah SDA dimintai bisa menemui empat wakil ketua umum dan ketua majelis pakar dan pertimbangan.

Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair yang hadir di kantor DPP PPP mengaku sedih atas kistrub yang menimpa PPP. Ia berharap islah kedua pihak bisa segera dilaksanakan.

Maimun pun menyampaikan fatwa tentang islah antara pihak Suryadharma Ali dan Romahurmuziy. Fatwa tersebut adalah bentuk dari kekhawatiran



**Ada Tiga Bakal Cawapres Prabowo**

**Hlm- 9**

an para kiai terhadap kistrub yang melanda PPP. Maimun juga mengatakan, dalam pilpres nanti, PPP belum menyatakan berkoalisi dengan parpol manapun. Ihwal koalisi dan penentuan cawapres atau cawapres, kata Maimun, akan ditentukan dalam rapat pimpinan nasional.

SDA menerima dan menanggapi singkat fatwa itu. Ia mengatakan, ada kesalahpahaman terkait koalisi dengan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. “Kami belum ada kesepakatan untuk berkoalisi. Secara formal belum ada,” kata SDA.

Romi yang dihubungi kemarin menegaskan, islah harus dilaksanakan

tanpa syarat. Kedua pihak, katanya, harus mundur satu langkah dan mengaku sama-sama salah agar suara partai bersatu. “Kalau memang mau islah, harus akui kesalahan dan tanpa persyaratan,” kata Romi.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Gerindra Suhardi mengaku tidak kaget dengan keputusan PPP. Gerindra lebih senang melihat PPP bisa islah dan menyelesaikan konflik internalnya. Gerindra, kata dia, tidak dalam kapasitas mengomentari keputusan PPP. “Iu wilayah mereka, kami siap saja dengan keputusan PPP,” kata Suhardi.



# Ke Mana Partai Ka'bah Berlindung?

■ Oleh Irfan Fitrat

**P**artai Persatuan Pembangunan (PPP) belum memutuskan untuk bermitra dengan partai mana pun atau mendukung calon presiden (capres) tertentu. PPP baru kembali melakukan perjalanan dengan partai lain selepas menyelesaikan perbedaan pendapat di tubuh partai.

Setelah islah tercapai pada Mukernas III, 23-24 April, langkah PPP untuk berkoalisi kembali ke titik nol. Padahal, sebelumnya Ketua Umum DPP Suryadharma Ali sempat membuka gerbang partai untuk memberi dukungan kepada capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Suryadharma bahkan datang pada kampanye terbuka Partai Gerindra di Gelora Bung Karno.

Langkah Suryadharma itu yang memicu terjadinya perbedaan di inter-

nal PPP. Namun, PPP mengklaim persoalan yang ada sudah dapat dituntaskan pada Mukernas III. Lalu ke mana PPP akan berkoalisi dan men-

garahkan suaranya? Partai bertembang. Ka'bah ini belum membuat keputusan. Penajakan masih dilakukan dan pada Selasa (6/5) sejumlah petinggi DPP PPP melakukan pertemuan dengan elite PDI Perjuangan (PDIP). "Jadi, saya sering mengatakan bahwa pada saat ini masih banyak ke-

putusan. Ada yang mau ke Pak Jokowi (Joko Widodo-PDIP), ada yang mau ke Pak Ical (Aburizal Bakrie-Partai Golkar), ada yang mau ke Pak Prabowo (Gerindra). Mungkin juga ada yang mau ke pihak lain, mungkin," ujar Suryadharma, Selasa (6/5) malam.

Menang, menurut Suryadharma, sekarang ini pendapat internal partai masih berbeda-beda. Akan tetapi, ia mengatakan, nantinya seluruh keinginan itu harus di satukan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP.

Forum pada 10 Mei mendatang ini yang akan menghasikan keputusan langkah PPP. Di situ lah baru diketahui secara resmi ke mana arah PPP mendukung capres, ujarnya.

## Majelis Musyawarah PPP ditugaskan untuk menjadi komunikator politik partai.

Sebelum rapimnas itu, PPP masih membuka komunikasi politik dan pengajakan. Hasil Mukernas III mengugaskan Suryadharma selaku ketua umum dan "wali songo" dari Majelis Musyawarah PPP untuk menjadi komunikator politik partai. Mereka, yakni empat Wakil Ketua Umum Hasrul Az-

war, Suharsa Monoarfa, Emron Pangkapi, dan Lukman Saifudin.

Kemudian, Sekretaris Jenderal M Romahurmuziy serta tiga Ketua Majelis KH Maimoen Zubair (Syantahl), KH Zarkasih Nur (Pertimbangan), dan Barlianta Harahap (Pakar). Selain itu, ada juga Ketua Mahkamah Partai Chozin Chumaidy.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Anur Rofiq mengatakan, salah satu faktor yang sangat diperhitungkan oleh elite dan petinggi PPP, yakni gerak-gerik, arah, dan sinyal politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, Rofiq menjelaskan, SBY dianggap masih mampu mempertahankan basis massa dan loyalis utama Partai Demokrat. Meskipun, berdasarkan hasil *quick count*, perolehan suara Partai Demokrat saat pemilu legislatif hanya mencapai lebih dari 9,5 persen.

Artinya, Rofiq menambatkan basis massa dan loyalis utama Partai Demokrat itu menialai kinerja pemer-

intahan Presiden SBY berjalan sukses dan berhasil melaksanakan janji-janji politiknya selama ini. Perolehan suara Partai Demokrat ini menjadi salah satu pertimbangan utama PPP dalam membentuk dan menentukan langkah koalisi parpol menjelang Pilpres 2014.

Menurutnya, sinyal SBY nanti akan dibawa dalam pembahasan di rapimnas yang akan digelar pada 9-10 Mei 2014 di Bogor, Jawa Barat. Dalam forum rapimnas itulah akan diputuskan dengan siapa atau pihak mana PPP akan berkoalisi.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengatakan, PPP merasa perlu melakukan pendekatan ke berbagai pihak untuk mendapatkan info yang lengkap tentang siapa yang akhirnya akan didukung. Di atas semua itu, PPP insya Allah akan memberikan dukungan kepada bakal capres yang memastikan kemenangan umat," ujarnya. ■ **ed:** muhammad fakhruddin

# Koalisi PPP tanpa Syarat

■ Esthi Maharani

## PPP tidak menawarkan tokoh untuk dijadikan cawapres Prabowo.

JAKARTA — Dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto diklaim tanpa syarat. Bahkan, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk memilih pasangannya.

“Bagi saya, tergantung cawapresnya pasangan yang mana yang nyaman dan aman. Prabowo yang lebih tahu. PPP memberikan dukungan nontransaksional,” katanya di kantor presiden, Rabu (14/5).

Ia mengatakan, cawapres yang dipilih Prabowo sudah selayaknya memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, sehingga mampu mendorong perolehan suara. Sedangkan PPP lanjutnya, tidak menawarkan tokoh untuk dijadikan cawapres Prabowo. “Tidak ajukan cawapres. Saya kira itu kita serahkan pada capres untuk yang terbaik,” katanya.

Mengenai komitmen koalisi tanpa

syarat, Ketua Departemen Wirausaha Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Habil Marati berklah kalau hal itu harus dipahani dalam konteks menghilangkan sekat-sekat ideologi. Sementara, untuk koalisi harus dibicarakan *power sharing* (pembagian kekuasaan) dan sebagainya. “Jadi, memaknai koalisi tanpa syarat jangan diartikan kita *nggak* berhak sama sekali membicarakan *power sharing*,” tuturnya.

Habil memprotes rencana duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. “Ini tiba-tiba, ada kabar Prabowo menggandeng Hatta Rajasa. Kita belum duduk bersama membahas cawapres,” ujarnya.

Dia berharap, Prabowo bisa menggandeng Suryadharma Ali sebagai representasi Nahdlatul Ulama (NU). Sebab, menurut Habil, mayoritas umat Islam di Indonesia berafiliasi ke NU. “Di Indonesia, sekitar 60 juta warga NU, harusnya wakilnya Prabowo *ngambil* dari NU. Jokowi sudah mengambil PKB untuk bisa mendulang suara dari warga NU. PPP dukung Prabowo itu harapannya memang, *kok* malah menggandeng bukan orang NU,” kata Habil.

Pengamat politik Islam Universitas Indonesia (UI) Abdul Muta’ali menilai, pasangan Prabowo-Hatta justru memperkuat koalisi kaum “Nahdliyin” dan

warga “Marhaen”. Pasalnya, ujar Muta’ali, Hatta adalah figur tokoh nasional yang paling akomodatif dalam melihat peta kekuatan dari poros lainnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berbasis Nahdlatul Ulama (NU), papar Muta’ali, memang berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI/P). Sedangkan, Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbasis Muhammadiyah juga berkoalisi dengan Partai Gerindra.

Namun, jelas Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) UI itu, situasi ini tidak otomatis menggambarkan pertarungan politik antara NU versus Muhammadiyah. Menurut Muta’ali, jika nanti pasangan Prabowo-Hatta benar-benar dideklarasikan maka pasangan ini akan akan banyak mengembalikan “perselingkuhan” kaum NU dengan massa Marhaen. “Kita perlu ingat bahwa dalam poros Gerindra juga ada PPP yang mayoritas berbasis warga Nahdliyin,” ujarnya.

Menurutnya, ikhtiar politik Gerindra dengan PAN tentu harus dihormati semua pihak, ujarnya, termasuk rekan-rekan sesama partai politik (partai) Islam maupun berbasis massa Islam.

Ibaratnya, kata dia, jika partai Islam belum mampu membeli rumah sendiri, jalan keluarnya ialah mengontrak di rumah orang lain. ■ c57 ed: muhammad fekhruddin